

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020). Terlaksananya tata pemerintahan yang baik dengan karakteristik pelaksanaan *good governance* yaitu partisipasi, pengawasan, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektif dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis (Mardiasmo, 2018).

Dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik, diperlukan pengelolaan kinerja anggaran yang baik. Pengelolaan kinerja anggaran mengacu pada pencapaian tujuan dan hasil dari penggunaan anggaran. Kinerja anggaran berbasis *value for money* digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil yang diperoleh sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kinerja anggaran dengan konsep *value for money* didasarkan pada tiga indikator yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018:5).

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam laporan rancangan awal rencana strategis tahun 2019-2023 terdapat anggaran yang belum terealisasi dengan baik. Hal ini tentunya membuat Bappeda perlu melakukan upaya untuk menutup anggaran yang tidak terealisasi. Berdasarkan Renstra BAPPEDA Tahun 2019-2023, pada tahun 2022 beberapa target kinerja sudah tercapai, tetapi terdapat permasalahan yang dihadapi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan program yaitu belum optimalnya kualitas substansi perencanaan dan belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

**Tabel 1. 1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Pelayanan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan**

Uraian	Anggaran (Rp.Milyar) pada Tahun					Realisasi Anggaran (Rp.Milyar) pada Tahun					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Total Belanja	32,67	29,65	30,51	35,22	38,67	30,18	26,28	28,07	29,28	N/A	92,38	88,63	92	83,13	N/A	4,72	-0,60
Belanja Operasi	19,53	15,38	30,51	34,13	38,21	18,08	13,63	28,07	28,20	N/A	92,58	88,62	92	82,63	N/A	25,25	27,26
Belanja Pegawai	13,14	14,26	14,77	19,42	22,17	12,1	12,66	14	14,51	N/A	92,09	88,78	94,79	74,71	N/A	14,44	6,29
Belanja Barang dan Jasa	15,65	12,39	16,9	14,71	16,03	14,28	10,8	13,03	13,69	N/A	91,25	87,17	77,10	93,06	N/A	2,90	0,45
Belanja Modal	3,88	1,79	1,04	1,09	0,46	3,8	1,65	1,03	1,08	N/A	97,94	92,18	99,04	99,08	N/A	-37,19	-29,77

Sumber: Ranwal Renstra BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026

Berdasarkan realisasi anggaran pada tabel 1.1, diketahui setiap tahunnya anggaran pelaksanaan program mengalami fluktuasi. Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2019 sebesar Rp.32,67 Milyar. Pada tahun 2020 menurun menjadi Rp. 29,65 Milyar atau sekitar 8,23% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 30,51 Milyar. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp. 35,22 Milyar, sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 38,67 Milyar atau meningkat sebesar 9,8% dari tahun sebelumnya. Dilihat dari rasio antara realisasi dan anggaran paling tinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 92,38% sedangkan paling rendah pada Tahun 2022 yaitu sebesar 82,13%. Apabila dilihat rasio realisasi dari Tahun 2019-2023, rasio terendah adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 82,13%. Rendahnya rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2022 disumbang oleh Belanja Pegawai yang memiliki rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 74,71%. Hal ini disebabkan oleh tunjangan kinerja pegawai hanya dapat direalisasikan selama 6 bulan dari yang dianggarkan sebanyak 12 bulan.

Berdasarkan LKjIP BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 akuntabilitas BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2022 mendapatkan predikat AA (Sangat Memuaskan). Berikut laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel 1. 2 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021**

Kegiatan	Anggaran 2021	Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22.207.822.800	20.713.816.708	93,27%
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.956.840.000	3.557.089.979	89,90%
Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.341.500.000	3.795.302.316	87,42%

*Sumber: LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021*

**Tabel 1. 3 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022**

Kegiatan	Anggaran 2022	Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	27.767.500.952	22.509.381.060	81,06%
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.497.975.000	4.395.071.063	97,71%
Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.961.192.146	2.863.794.226,	96,71%

*Sumber: LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022*

Berdasarkan tabel realisasi anggaran diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 - 2022 anggaran pelaksanaan program mengalami fluktuasi yang artinya anggaran setiap tahun tidak tetap atau mengalami kenaikan maupun penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 dalam pelaksanaan 3 (tiga) program tersebut tidak terealisasi dengan baik sebab beberapa kegiatan dibatasi pelaksanaannya karena dampak dari *pandemic covid 19* yang dilakukan dengan cara rasionalisasi dan *refocusing* anggaran. Kemudian di tahun 2022 realisasinya mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa kegiatan dilakukan secara daring sebagai antisipasi penyebaran dampak *covid 19*, dan serapan realisasi pada Triwulan IV tahun anggaran 2022 realisasi keuangan sebesar 84,50% sedangkan pada periode yang sama tahun anggaran 2021 yaitu 92%.

Berdasarkan data realisasi anggaran diatas dijelaskan dalam LKjIP Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 bahwa penurunan realisasi ini disebabkan karena pembayaran tunjangan kinerja pegawai BAPPEDA hanya dibayarkan 6 bulan dari 12 bulan yang dianggarkan. Berdasarkan kendala yang yang dihadapi pertahun-nya setiap program yang dilaksanakan belum terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran pemerintah masih belum terlaksana dengan teratur. Dimana anggaran dalam pembangunan daerah masih belum terealisasikan secara sempurna. Artinya, kinerja anggaran belum terselenggara sesuai keinginan, harapan dan tujuannya. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, dibutuhkan cara untuk menekan masalah kinerja anggaran tersebut. Akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

Ada beberapa hal yang diduga mempengaruhi kinerja anggaran berbasis *value for money* yaitu akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa “akuntabilitas adalah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. Akuntabilitas digunakan untuk meminimalisir kecenderungan kekurangan atau penyalahgunaan wewenang tetapi dapat juga meningkatkan kinerja pemerintah

daerah. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat. Masyarakat menuntut agar pemerintahan dapat mengelola anggaran secara akuntabel, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Hermanto, 2018). Dalam penelitian Safitri (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*. Semakin baik pertanggungjawaban, maka akan semakin baik penerapan kinerja pada sebuah instansi pemerintah (Sari & Hanum, 2021). Sedangkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Afriani (2018) menyatakan akuntabilitas tidak mempengaruhi kinerja anggaran berbasis *value for money*.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan publik (Mardiasmo, 2018). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan kepentingan publik harus secara langsung dapat diperoleh pihak yang membutuhkan (Cindy, 2018). Transparansi dilakukan untuk proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran pemerintah. Transparansi dalam pemerintah daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi kepada masyarakat secara terbuka, mudah dipahami, dan dapat dilihat oleh semua pihak yang berkepentingan. Dalam penelitian Ashari, dkk (2020) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*.

Ketepatan waktu (*timeliness*) diartikan sebagai suatu informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan dan sebelum informasi tersebut tidak lagi mempengaruhi sebuah keputusan (Chariri and Ghazali, 2016). Setiap informasi mengenai anggaran akan dibutuhkan lebih awal oleh pengguna anggaran, untuk menghindari keterlambatan dalam pengambilan keputusan penganggaran. Dalam penelitian Indah dkk., (2017) menyatakan ketepatan waktu berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Salman (2021), Wandari dkk., (2016) menyatakan bahwa Ketepatan Waktu berpengaruh positif terhadap Kinerja anggaran berbasis *value for money*.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Pengawasan adalah penilaian, evaluasi, dan kontrol terhadap keseluruhan proses kegiatan pemeriksaan yang bertujuan agar perencanaan dan pelaksanaan berjalan maksimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.” Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum program atau kegiatan yang dilaksanakan, dalam pengelolaan anggaran yang berorientasi ekonomi, efisien, dan efektivitas dapat meningkatkan capaian suatu kegiatan, program, dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan pemerintah (Kaukab & Ashari, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Setiyaningrum (2017), Amin, dkk (2022) dan Batubara (2020) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*.

Berdasarkan latar belakang, perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan berbagai permasalahan yang terkait di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan.**”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah pengaruh Ketepatan Waktu terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan?

4. Apakah pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan secara simultan terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar pembahasan terfokus dan tidak meluas. Penelitian hanya menitikberatkan pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk menguji:

1. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ketepatan Waktu terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.
5. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan secara simultan terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

### 1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti untuk memperkuat penelitian sebelumnya dan menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh khususnya mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga Politeknik Negeri Sriwijaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya Program Studi Akuntansi Sektor Publik.

2. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai pentingnya meningkatkan rasa tanggung jawab pemerintah daerah dalam menentukan strategi untuk meningkatkan kinerja berbasis anggaran.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja berbasis anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.